

PENERAPAN KECAMATAN INTRANET DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

Izzatul Mufidah

12040674246 (S-1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) izzatulmufidah@gmail.com

Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.

0019018306 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) efanida@yahoo.com

Abstrak

Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintah yang baik diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien harus dilakukan langkah-langkah perubahan salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Kecamatan Sukodono membuat inovasi Kecamatan Intranet yang merupakan "website internal" antara kecamatan Sukodono dan 19 desa. Inovasi ini ditujukan untuk memberikan pelayanan administrasi agar lebih mudah dan untuk mewujudkan penyampaian informasi dan komunikasi, e-mailing dan sharing data antara pemerintah desa dengan kecamatan secara elektronik, serta mewujudkan pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan secara elektronik di sekretariat Kecamatan Sukodono. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan fokus yang digunakan pada penelitian penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah delapan elemen sukses manajemen proyek e-Government yaitu political environment, leadership, planning, stakeholders, budget, technology dan innovation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala. Hal ini dilihat dari elemen political environment yang termasuk dalam tipe proyek Bottom Up Project (BUP), elemen leadership yaitu peran dan tanggung jawab camat sebagai pemimpin sudah cukup baik, elemen planning yaitu perencanaan awal penerapan kecamatan intranet berasal dari masalah administrasi pemerintahan di kecamatan dan desa, elemen stakeholders yang mendukung penuh dan menjalankan perannya dengan baik, elemen transparency/visibility dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi satu minggu sekali, elemen budget yaitu anggaran yang berasal dari kecamatan dan APBDes, elemen technology sudah baik meskipun jaringan terkadang mengalami trouble, dan elemen innovation yaitu akan dikembangkan lagi menjadi pelayanan online.

Kata Kunci: *electronic government, intranet.*

Abstract

The demand for good government organizers aimed at the realization of efficiency, effectiveness, and clean government. Aligned with this, the government realized that in order to make government effective and efficient must be measures changes in one of them by utilizing sophisticated communications technology. Sukodono district create innovation kecamatan intranet which is "internal website" between Sukodono districts and 19 villages. This innovation aimed to deliver information and communication, e-mailing, and data sharing electronically, and make correspondence management and archiving electronically at the secretariat Sukodono District. The purpose of this study to describe the implementation of kecamatan intranet in Sukodono District Sidoarjo Regency. This type of research that used in this research is descriptive with qualitative approach. Data collection techniques used were interviews, documentation, and observation. While the research used focus implementation of kecamatan intranet in the Sukodono District Sidoarjo regency are eight elements of a successful e-Government project management by Indrajit, which is political environment, leadership, planning, stakeholders, budget, technology and innovation. The result showed that the implementation of kecamatan intranet in Sukodono District Sidoarjo Regency is already good, although not optimal because there are some problem. It is seen from the political environment elements are included in the Bottom Up Project (BUP) type, leadership element is the role and responsibilities of district head as the leader is good enough, planning elements is planning of kecamatan intranet comes from administrative problem in the district Sukodono and village, stakeholders elements

that fully support and function well, transparency / visibility elements is evidenced by the coordinating meeting once a week, budgets elements is the budget come from the Sukdono district and APBDes, technology elements has been good despite sometimes the networks get trouble, and innovation elements that will be developed into an online service.

Keywords: electronic government, intranet

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pemerintah. Dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah dituntut untuk melaksanakan pembangunan, mengelola anggaran keuangan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah sebaik mungkin, karena pemerintah daerah merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah yang merupakan sub sistem dalam sistem pemerintahan negara (Supriatna, 1996:86).

Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintah yang baik diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Agar pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti dikemukakan Gie (1991) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja adalah motivasi kerja, kemampuan kerja, suasana kerja, lingkungan kerja, perlengkapan/fasilitas dan prosedur kerja.

Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan birokrasi secara cepat, ringkas dan tidak berbelit-belit, serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien harus dilakukan langkah-langkah perubahan salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Pemanfaatan ini dilakukan karena pengguna penggunaan teknologi informasi saat ini semakin berkembang luas. Hal tersebut seperti yang dituliskan dalam website resmi kemkominfo sebagai berikut:

“Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia.” (sumber: <http://kominfo.go.id>)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa presentase pengguna komunikasi dan informasi dalam hal ini penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi. Melihat hal tersebut tidak ada salahnya jika pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi atau bisa disebut elektronik government (e-Government) untuk pelayanan publik yang lebih baik. e-Government diperlukan karena jawaban atas perubahan lingkungan strategik yang menuntut administrasi negara yang efisien, efektif, berorientasi pada publik, transparan dan akuntabel (Mustopadijaya: 2003). E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (Yakub, 2012:132).

Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government yang mengharuskan pemerintah pada tingkat pusat maupun tingkat daerah dapat mengembangkan dan menerapkan konsep e-Government. Sejak adanya Instruksi Presiden tersebut telah banyak instansi-instansi pemerintah yang mulai menerapkan konsep e-Government dengan setidaknya mempunyai website resmi yang dapat diakses masyarakat, melalui website ini setidaknya pemerintah telah menyediakan dan memberikan informasi yang dapat diakses masyarakat kapan saja. Selain itu juga banyak ajang dan penghargaan untuk memberikan reward untuk situs pemerintahan yang baik dan inovatif. Salah satunya adalah ICT pura yang diadakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemekominfo), salah satu daerah yang mendapatkan ICT pura pada tahun 2012 adalah Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang dilansir dalam salah satu media berita online berikut ini:

“Sebanyak 30 kabupaten dan kota memperoleh penghargaan ICT Pura dari Kementerian Komunikasi dan Informasi karena dinilai berhasil dalam aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk kategori muda, juga terdapat 9 daerah. Masing-masing Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Jepara, Kab Sidoarjo, Kuantan Singingi, Kab Bolaang Mongondow Timur, Kota Tangerang

Selatan, Kota Solok dan Kab Halmahera Utara.” (Sumber: <http://news.detik.com>)

Dari berita tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu daerah yang menerapkan konsep e-Government, hal ini dibuktikan dengan adanya website resmi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang didalamnya terdapat situs resmi lainnya seperti domain dinas-dinas, badan-badan hingga website 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Penerapan e-Government tidak hanya dilakukan oleh pemerintah di kabupaten saja namun pemerintah di tingkat kecamatan di Sidoarjo juga menerapkannya salah satunya adalah Kecamatan Sukodono.

Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selain itu kecamatan juga mempunyai tugas lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana kecamatan mempunyai tugas untuk memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari kedua undang-undang diatas diketahui bahwa kecamatan memiliki tugas yang kompleks, hal ini membuat penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sukodono menjadi tidak maksimal. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi kecamatan sukodono mengenai administrasi pemerintahan, hal ini seperti yang ungkapkan Bapak Eri Sudewo selaku Sekretaris Kecamatan Sukodono sebagai berikut:

“Kita ada 19 desa, kalo mau mendistribusikan surat membutuhkan orang, tenaga, waktu, dan biaya yang banyak. Sementara itu aparatur kita terbatas, anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga terbatas. Karena tugas dan fungsi kecamatan dalam melaksanakan kewenangan sangat umum dan luas.” (wawancara tanggal 18 Januari 2016)

Dari penjelasan diatas mengenai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sukodono terdapat masalah lain yakni belum optimalnya pemanfaatan pengelolaan, pendistribusian dan penyimpanan naskah dinas, dan juga belum optimalnya penyampaian informasi

dan komunikasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melihat kendala-kendala yang dihadapi, maka Kecamatan Sukodono berupaya untuk memperbaiki tingkat efektif dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kecamatan Sukodono berupaya dengan membuat inovasi baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang disebut electronic government. Penerapan ini merupakan inovasi baru yang pada tingkat kecamatan, dan telah mendapatkan penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur 2015. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam website resmi Kabupaten Sidoarjo seperti berikut ini:

“Penyediaan jaringan internet dan intranet di seluruh desa yang ada di Kecamatan Sukodono telah dilakukannya. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi yang lebih mudah, cepat dan efisien. Sukodono ini sudah mendeklarasikan diri sebagai kecamatan intranet, kita menggunakan sarana teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, ujaranya” (sumber: <http://www.sidoarjokab.go.id>)

Dari berita diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Sukodono telah menerapkan Kecamatan Intranet, inovasi ini ditujukan untuk memberikan pelayanan administrasi agar lebih mudah. Terlebih untuk pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Sukodono yang dahulunya masih manual kini berubah menjadi ke sistem elektronik. Inovasi ini diciptakan untuk untuk mewujudkan penyampaian informasi dan komunikasi, e-mailing dan sharing data antara pemerintah desa dengan kecamatan secara elektronik, serta mewujudkan pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan secara elektronik di sekretariat Kecamatan Sukodono.

Intranet merupakan jaringan yang terbatas lingkup penggunaannya pada sebuah organisasi atau institusi. Intranet bersifat pribadi dan terbatas hanya digunakan oleh orang-orang yang berada pada organisasi tersebut (Istiana, 2008:27). Kendala yang dihadapi saat menerapkan intranet adalah jika jarak antara satu kantor dengan kantor lain jauh karena intranet disini lingkungnya terbatas. Disini Kecamatan Intranet merupakan “website internal” antara kecamatan Sukodono dan 19 desa, adanya program Kecamatan Intranet ini memudahkan pekerjaan aparatur kecamatan maupun aparatur desa.

Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kecamatan Sukodono, seperti wawancara dengan camat Sukodono M. Ainur

Rahman yang dilakukan oleh peneliti sebagai observasi awal :

“ya banyak kendalanya, salah satunya merubah mindset aparatur. Baik itu aparatur kecamatan maupun apartatur desa. Merubah mindset orang kan susah, semua punya pemikiran sendiri-sendiri. Apalagi kalo masalah teknologi seperti ini” (wawancara tanggal 29 Desember 2015)

Hal tersebut juga diperkuat oleh wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Nur Iskan selaku staf Kecamatan Sukodono seperti berikut ini:

“Kendala? Banyak mbak. Seperti biaya, lalu keterbatasan SDM dan faktor cuaca itu kalau musim hujan gini biasanya sering eror” (wawancara tanggal 18 Januari 2016)

Dari kedua penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada penerapan Kecamatan Intranet masih dijumpai beberapa kendala, meskipun segala sesuatunya telah disiapkan untuk mengimplementasikan Kecamatan Intranet. Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan Kecamatan Intranet di Kecamatan Sukodono dengan judul “Penerapan Kecamatan Intranet di kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Kecamatan Intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Kecamatan Intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, baik teoritis maupun praktis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang penerapan Electronic

Government serta memberikan masukan dan ilmu dalam Penerapan Kecamatan Intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima guna mengembangkan teori khususnya mengenai kajian e-Government dan menganalisis berbagai masalah yang ditemui.
- b. Bagi Instansi penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan masukan terhadap penerapan Kecamatan Intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- c. Bagi Masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penerapan Kecamatan Intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memberikan gambaran secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya lapangan studi (Sutopo, 2002:111). Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau membuat suatu hubungan antara variabel (Sugiyono 2010:11). Penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan mengenai Penerapan Kecamatan Intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data.

Fokus Penelitian pada penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana penerapan Kecamatan Intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori tentang delapan elemen sukses manajemen proyek Electronic Government yang dikemukakan oleh Indrajit (2002:61) yaitu:

1. *Political Environment*,
2. *Leadership*,
3. *Planning*,
4. *Stakeholders*,
5. *Transparency/Visibility*,
6. *Budget*,
7. *Technology*,
8. *Innovation*.

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) pihak yang akan menjadi informan yaitu pihak kecamatan dan pihak

desa. Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pihak Kecamatan
 - a) Sekretaris Kecamatan Sukodono
 - b) Pranata Komputer Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukodono
 - c) Polisi Pamong Praja Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Sukodono
- 2) Pihak Desa
 - a) Kepala dan Perangkat Desa Pekarungan
 - b) Kepala dan perangkat Desa Sukodono
 - c) Kepala dan Perangkat Desa Suruh

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kecamatan Intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah inovasi pertama di Sidoarjo dan pada tahun 2015 mendapat penghargaan dalam ajang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur. Latar belakang lahirnya proyek ini dilihat dari masalah-masalah yang ada dalam administrasi surat-menyurat oleh Kecamatan Sukodono dan 19 desa yang dinaungi atau dibina. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Sukodono dari sistem manual ke sistem elektronik menuju penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien. Melalui proyek ini juga diharapkan dapat mengubah pengelolaan naskah-naskah dinas dari manual menjadi paperless dan diharapkan dapat mengubah pola perilaku dan mindset aparatur agar lebih berwawasan dan melek teknologi serta dapat mewujudkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam reformasi birokrasi.

Pada penelitian ini akan dijelaskan dan dideskripsikan mengenai penerapan Kecamatan Intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori Delapan Elemen Sukses Manajemen Proyek Electronic Government oleh Indrajit (2002), dalam teori terdapat delapan elemen untuk mendeskripsikan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. *Political Environment*

Political Environment ini merupakan elemen yang menggambarkan bagaimana keadaan atau lingkungan politik sebuah proyek e-Government dijalankan. Terkait dengan penelitian ini, penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono termasuk dalam tipe Bottom Up Project (BUP) karena ide

pembuatan kecamatan intranet berasal dari Kecamatan Sukodono sendiri, dan tanggung jawab penuh oleh Camat Sukodono. Camat dan sekretaris kecamatan merupakan elemen yang mempunyai pengaruh penting, karena keduanya merupakan top leader dan project leader yang mempunyai inisiatif untuk menciptakan sebuah inovasi intranet. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penerapannya yaitu dengan membentuk tim IT kecamatan dimana dalam tim IT tersebut mendatangkan pihak ketiga yang ahli dalam bidang program dan jaringan. Kemudian pihak lain yang terlibat adalah pihak kecamatan yakni kepala seksi setiap bagian dan juga pihak desa yaitu kepala desa.

Selanjutnya terkait dengan dasar hukum, penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono ini mengacu kepada Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Peningkatan Penggunaan Telematika di Indonesia dan Keputusan Menteri Peningkatan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dengan adanya kecamatan intranet ini alur pemerintahan khususnya surat-menyurat menjadi lebih cepat, dan efektif. Penerapan ini juga diterima dengan baik oleh semua pihak baik pihak kecamatan dan desa, mereka merasa sangat terbantu dengan adanya intranet tersebut.

2. *Leadership*

Kepemimpinan merupakan faktor penting pada penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono. Kepemimpinan juga merupakan kunci berhasil tidaknya proyek kecamatan intranet, terkait hal ini ide penerapan kecamatan intranet berasal dari Sekretaris Kecamatan Sukodono yang kemudian ditindak lanjuti oleh Camat Sukodono, dan kemudian dibentuk tim IT untuk membuat aplikasi-aplikasi dan membangun jaringan intranet di kecamatan dan desa. Kepemimpinan pak camat ini juga dibantu oleh sekretaris Sukodono yang bertindak sebagai koordinator atau project leader penerapan proyek kecamatan intranet, beliau beserta pak camat bertugas untuk mengkoordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek kecamatan intranet.

Camat Sukodono juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam penerapan kecamatan intranet, hal ini terlihat dalam konsistensinya mulai dari mengkoordinir dari perencanaan hingga pelaksanaan Kecamatan Intranet. Sekretaris kecamatan juga memiliki peran sebagai project leader yang mengatur atau mengendalikan pelaksanaan proyek dan bertugas

memberikan arahan kepada tim IT. Melalui pembagian peran ini, kepemimpinan untuk proyek kecamatan intranet berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari segala pihak baik pihak kecamatan dan pihak desa.

3. *Planning*

Perencanaan merupakan salah satu elemen yang penting dalam penerapan proyek, perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan proyek e-Government. Dalam penerapan Kecamatan Intranet perencanaan berawal dari melihat masalah yang dihadapi oleh pihak kecamatan dan desa dalam surat-menyurat. Terbatasnya staff atau aparatur kecamatan dan desa, terbatasnya anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dan juga jumlah desa yang banyak yaitu sebanyak 19 desa. Jika surat menyurat dilaksanakan secara manual maka membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang banyak sehingga pekerjaan menjadi tidak maksimal.

Melihat hal tersebut kemudian Kecamatan Sukodono berinisiatif untuk membuat proyek intranet, kemudian pada pertengahan awal dibuatlah tim dan rencana kerja, lalu penyusunan untuk pembuatan aplikasi elektronik, setelah aplikasi selesai kecamatan mensosialisasikan kepada stakeholders, baru setelah itu diadakan pelatihan dan mulai diterapkan pada akhir 2014.

Perencanaan ini melibatkan pihak kecamatan yang terdiri dari pejabat struktural dan seksi-seksi kecamatan, seluruh kepala desa di Kecamatan Sukodono, juga melibatkan tim IT yang sengaja dibentuk khusus untuk proyek kecamatan intranet. Tim IT terdiri dari pihak kecamatan yang di koordinatori oleh Sekretaris Kecamatan Sukodono dan juga melibatkan pihak ketiga yakni konsultan IT yang memang ahli di bidang informasi dan teknologi. Penerapan proyek Kecamatan Intranet ini telah sesuai dengan yang direncanakan di awal, bahkan rencananya tahun 2016 ini dikembangkan ke pelayanan berbasis online.

4. *Stakeholders*

Stakeholders dalam proyek kecamatan intranet terdiri dari Stakeholders primer, sekunder dan utama. Stakeholders primer yaitu orang-orang yang langsung dipengaruhi oleh proyek kecamatan intranet, stakeholders ini adalah kepala desa dan perangkat desa. Kemudian stakeholders sekunder yaitu orang-orang yang tidak langsung dipengaruhi oleh proyek kecamatan intranet yakni staf kecamatan dan konsultan IT. Dan terakhir adalah stakeholders utama

yaitu orang yang memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kegiatan yakni Camat Sukodono.

Semua stakeholders tersebut telah berperan baik sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak dan juga sangat mendukung penerapan proyek kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono.

5. *Transparency/ Visibility*

Pada penerapan Kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono ini transparansi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dengan stakeholders-stakeholders. Rapat ini dibagi menjadi tiga rapat koordinasi, yang pertama adalah dengan stakeholders internal yaitu pihak kecamatan, rapat kedua dengan stakeholders eksternal yaitu pihak desa dan yang ketiga aslaah rapat koordinasi dengan tim IT pengelola intranet. Rapat ini ditujukan agar masing-masing stakeholders memahami akan penerapan intranet di kecamatan dan desa, rapat ini juga merupakan sosialisasi awal sebelum penerapan dilaksanakan.

Tidak hanya sebelum penerapan proyek kecamatan intranet, rapat koordinasi juga dilakukan saat proyek sedang berjalan. Rapat koordinasi dilakukan minimal satu minggu sekali yang dipimpin langsung oleh Camat Sukodono selaku top leader proyek tersebut.

6. *Budget*

Pada penerapan Kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono ini transparansi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dengan stakeholders-stakeholders. Rapat ini dibagi menjadi tiga rapat koordinasi, yang pertama adalah dengan stakeholders internal yaitu pihak kecamatan, rapat kedua dengan stakeholders eksternal yaitu pihak desa dan yang ketiga aslaah rapat koordinasi dengan tim IT pengelola intranet. Rapat ini ditujukan agar masing-masing stakeholders memahami akan penerapan intranet di kecamatan dan desa, rapat ini juga merupakan sosialisasi awal sebelum penerapan dilaksanakan.

Tidak hanya sebelum penerapan proyek kecamatan intranet, rapat koordinasi juga dilakukan saat proyek sedang berjalan. Rapat koordinasi dilakukan minimal satu minggu sekali yang dipimpin langsung oleh Camat Sukodono selaku top leader proyek tersebut.

7. *Technology*

Teknologi yang digunakan dalam penerapan kecamatan intranet ini menggunakan operating system dari Windows 7 sama Linux Fedora. Kemudian untuk aplikasi kecamatan sukodono memilih aplikasi yang bersifat freeware atau gratis namun disesuaikan

dengan kebutuhan di kecamatan dan desa. Terdapat empat aplikasi yang digunakan yaitu untuk chatting dan mailing list menggunakan aplikasi comAgent dengan server Mdaemon, lalu untuk voip atau telepon melalui jaringan intranet menggunakan aplikasi X-lite, HFS untuk file sharing dan terakhir untuk IP camera yang berfungsi untuk memonitor pelayanan di desa menggunakan D-newcam dari D-link.

Selanjutnya untuk sistem kerahasiaan dan keamanan, Kecamatan Sukodono masih menggunakan sistem keamanan yang manual hal ini dikarenakan terkendala dengan anggaran mengingat anggaran yang disediakan berasal dari pihak kecamatan dan desa sendiri. Sistem yang masih manual ini menimbulkan resiko penyusupan jaringan dan pembajakan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

8. *Innovation*

Pada proyek Kecamatan Intranet ini inovasi yang dikembangkan lagi menuju pelayanan online, inovasi ini disambut baik oleh Bupati Sidoarjo hingga Kecamatan Sukodono mendapatkan dukungan berupa anggaran dan peraturan. Inovasi ini juga dimaksudkan sebagai contoh inovasi di kecamatan yang nantinya dapat di terapkan di seluruh kecamatan yang ada di sidoarjo maupun luar sidoarjo. Inovasi menuju ke pelayanan online akan mulai dikembangkan pada tahun 2016 ini.

Kemudian untuk kecakapan atau kemampuan aparat dalam mengoperasikan dapat dikategorikan mampu karena telah melalui tahap pelatihan oleh tim IT Kecamatan Sukodono. Kemampuan aparatur juga membantu penerapan proyek kecamatan intranet agar proyek ini berhasil dan berkembang menuju inovasi-inovasi lainnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan kecamatan intranet sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala namun hambatan atau kendala tersebut akan dapat teratasi mengingat pada tahun 2016 ini akan dikembangkan menuju pelayanan online dan telah mendapatkan dukungan dari bupati Sidoarjo berupa peraturan dan anggaran. Adapun uraian singkat terkait delapan elemen sukses manajemen proyek electronic government (Indrajit, 2002) mengenai penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berikut ini:

Political Environment, Kecamatan Intranet Kecamatan Sukodono merupakan proyek yang masuk dalam kategori Bottom Up Project (BUP) karena kebijakan atau inisiatif proyek berasal dari Kecamatan Sukodono. Dengan berpedoman pada dasar hukum Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pelayangunaan Telematika di Indonesia dan Keputusan Menteri Pelayangunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Leadership dalam penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik, hal itu dibuktikan dengan pembentukan tim pengelola intranet oleh Camat Sukodono dan dikoordinatori oleh Sekretaris Kecamatan. Komitmen pemimpin juga terlihat dari tanggung jawab Camat Sukodono yang memonitor langsung pekerjaan staff baik di kecamatan maupun di desa.

Planning dalam penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan yang direncanakan sejak awal dan telah direalisasikan dengan baik oleh kecamatan sukodono dan 19 desa yang dinaungi. Pada perencanaannya proyek ini melibatkan pihak kecamatan, desa dan juga pihak ketiga yang ahli dalam bidang IT.

Stakeholders yang terlibat adalah pihak-pihak dari kecamatan, desa dan juga pihak luar yang merupakan ahli di bidang IT. Seluruh stakeholders mendukung penuh atas penerapan proyek Kecamatan Intranet dan menjalankan dengan baik peran dan tanggung jawab mereka.

Transparency/Visibility dalam penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah diwujudkan dengan adanya rapat koordinasi yang dipimpin oleh Camat Sukodono selaku Top Leader dan Sekretaris Kecamatan Sukodono selaku Project Leader. Rapat koordinasi ini dilakukan dengan seluruh stakeholders saat sebelum penerapan dilaksanakan hingga pada saat penerapan kecamatan intranet berjalan.

Budgets untuk penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono berasal dari anggaran kecamatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran ini sengaja dianggarkan kecamatan dan desa karena proyek ini merupakan proyek dari kecamatan sendiri, anggaran dialokasikan untuk pembangunan dan juga pemeliharaan.

Technology yang digunakan dalam penerapan kecamatan intranet menggunakan operating system dari Windows 7 dan Linux. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang bersifat freeware atau gratis. Namun untuk sistem kerahasiaan dan keamanan Kecamatan Sukodono masih menggunakan sistem yang manual.

Innovation dalam penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono ini merupakan inovasi baru dalam lingkup kecamatan, inovasi ini juga telah mendapatkan dukungan dari Bupati agar inovasi kecamatan intranet dapat dicontoh oleh kecamatan di Sidoarjo maupun luar Sidoarjo. Kecamatan Sukodono juga telah berinisiatif untuk mengembangkan pelayanan kecamatan menjadi online. Kemampuan dan kecakapan staf dalam mengoperasikan aplikasi juga sudah cukup karena telah melewati tahap pelatihan oleh Kecamatan Sukodono.

Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan agar dalam penerapan Kecamatan Intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dapat lebih baik lagi kedepannya, adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan bandwidth internet ditambah agar tidak sering terjadi gangguan karena masalah jaringan, mengingat kecepatan internet dibagi antara kecamatan dengan 19 desa.
2. Diharapkan Kecamatan Sukodono membuat sistem keamanan atau kerahasiaan lebih canggih lagi sehingga meminimalisir sistem dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Anwar, M. Khoirul dan Asianti Oetoyo S. 2004. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan di Era Otonomi Daerah SIMDA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiman, Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi.
- Indrajit, Zainuddin, Rudianto. 2005. E-Government In Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia). Yogyakarta: Andi.
- Istiana, B. Patmi dan Y. Maryono. 2008. Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Bogor: Quandra
- Ivonne, Radischa. 2014. 2. Implementasi Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai 1111 Versi 1.5 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Skripsi

Tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

- Lia Kuswayatno, dkk. 2004. Mahir berkomputer Teknologi Informasi dan Komunikasi: untuk kelas IX Sekolah Menengah Pertama. Bandung: Grafindo Media Persada
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Mustopadidjaja AR,. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja. LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
- O'Brien, James A. dan Marakas, George M. 2011. "Management Information Systems, 10th Edition". New York: McGraw-Hill/ Irwi
- Raska, Prita. 2012. Efektifitas Reformasi Birokrasi Di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI Dalam Pencapaian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia
- Robbins. P.S., 2002, Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Edisi kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rokhman, Ali. 2008. Potret dan Hambatan E-Government Indonesia: Inovasi Online. Edisi Vol.11/XX, Juli 2008
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metode penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta
- Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press.
- Supriatna, Tjahja. 1996. Sistem Administrasi Pemerintah Di Daerah. Jakarta: Bumi Aksara
- The Liang Gie, 1991. Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: PT. Nur Cahya
- Turban E., David King, Jae Lee, Ting-Peng Liang, and Deborah C. Turban. (2010). Electronic Commerce 2010 A Managerial Perspective Global Edition (6 edition). New Jersey: Pearson
- Yakub, 2012. Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Online

<http://sipatensidoarjo.com/> (online) diakses pada tanggal 10 Oktober 2015

<http://surabaya.tribunnews.com/2014/06/23/urus-imb-bisa-di-kantor-desa> (online) diakses pada tanggal 11 Oktober 2015

<http://www.beritasidoarjo.com/?p=7551> (online) diakses pada tanggal 10 Oktober 2015

<http://kominfo.go.id> (online) diakses pada tanggal 2 Februari 2016

<http://news.detik.com/berita/2066610/30-kabupaten-dan-kota-perolehpenghargaan-ictpura-kemenkominfo> (online) diakses pada tanggal 2 Februari 2016

<http://www.sidoarjokab.go.id> (online) diakses pada tanggal 2 Februari 2016

C. Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa